



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 April 2023

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 800.2.1/1978/SJ

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

Kementerian Dalam Negeri memberikan kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan:

1. SPCP IPDN Tahun 2023 dilaksanakan:
 - a. pendaftaran peserta Calon Praja IPDN Tahun 2023 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pendidikan tinggi kedinasan pada tanggal 3 April 2023 s.d. 30 April 2023;
 - b. pendaftaran dilakukan secara *online/daring* melalui laman <https://dikdin.bkn.go.id/>;
 - c. persyaratan dan jadwal SPCP IPDN Tahun 2023 sebagaimana tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini; dan
 - d. pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi dan informasi lainnya terkait pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2023 dapat dilihat pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id>.



Faint, illegible text centered at the top of the page.

Faint, illegible text centered in the upper middle section.

Faint, illegible text centered in the middle section.

Faint, illegible text centered in the lower middle section.

Faint, illegible text centered in the lower section.

800/03264
 64/04/2007 (1MRS3A1)

 Pemerintah Daerah DIY

2. Menyebarluaskan informasi, sosialisasi, dan memfasilitasi dalam rangka kelancaran pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2023.
3. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2023 tidak dipungut biaya, kecuali pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada laman <https://dikdin.bkn.go.id/> sesuai kode *billing* yang dikeluarkan oleh BKN.
4. Biaya SPCP IPDN Tahun 2023 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.
5. Dalam hal terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2023 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.
6. Pengaduan terhadap proses pendaftaran SPCP IPDN Tahun 2023 dapat disampaikan melalui:
 - a. Email spcpipdn@ipdn.ac.id dan/atau kerjasama_humas@ipdn.ac.id selama pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2023; dan
 - b. Call Centre SPCP IPDN Nomor 0-804-1-700-700 pada jam kerja selama masa pendaftaran SPCP IPDN dari tanggal 3 April 2023 s.d. 30 April 2023.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

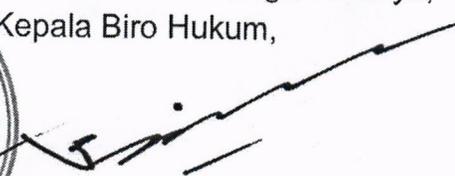
ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta; dan
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1001

800/IV.23/M.06-15

BIDANG KAM.INFO DAN PERSANDIAN DISKOMINFO DIY	ACC	
	TERIMA	KIRIM
	4/23	
	11.55	

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 800.2.1/1978/SJ
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TAHUN 2023

I. PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan umum:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Januari 2023; dan
- c. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

2. Persyaratan administrasi:

- a. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan Paket C, bagi lulusan Tahun 2020 – 2023, dengan ketentuan:
 - 1) Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah; dan
 - 2) Nilai Rata-rata Ijazah bagi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah.
- b. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pernyataan/persamaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Berdomisili minimal 1 (satu) tahun di Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP-el, Kartu Keluarga dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, dikecualikan bagi orang tua (Bapak/Ibu Kandung) peserta yang lahir di tempat pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran orang tua dan/atau surat penempatan pindah tugas orang tua dari instansi masing-masing. Apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

- d. Surat Keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun 2023 untuk dokumen awal persyaratan pendaftaran;
 - e. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP ditandatangani oleh Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua berdasarkan keanggotaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui oleh Kepala Distrik pada Kabupaten/Kota pendaftaran, yang dibuktikan dengan cap/stempel basah;
 - f. Pakta Integritas Tahun 2023;
 - g. Alamat *e-mail* yang aktif; dan
 - h. Pasfoto berwarna ukuran foto 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah.
3. Persyaratan lain – lain:
- a. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
 - b. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat;
 - c. Tidak bertato;
 - d. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
 - e. Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan;
 - f. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
 - g. Apabila pendaftar dinyatakan lulus, maka pendaftar:
 - 1) tidak diperkenankan mengundurkan diri;
 - 2) sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
 - 3) bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi yang memilih kuota provinsi dan bagi yang memilih kuota Kabupaten/Kota bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS berdasarkan kuota pilihan pada saat pendaftaran;
 - 4) bersedia ditempatkan di seluruh kampus IPDN pada saat proses pembelajaran;
 - 5) bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN; dan
 - 6) bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan Pelanggaran Disiplin Praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja.

4. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan diatas, maka pendaftar dinyatakan GUGUR.

II. PENDAFTARAN PESERTA

1. pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN <https://dikdin.bkn.go.id>;
2. mengunggah dokumen persyaratan administrasi peserta dengan ukuran dan format tertentu sesuai dengan aplikasi yang termuat pada laman resmi SSCASN BKN <https://dikdin.bkn.go.id>.

III. JADWAL PELAKSANAAN SPCP IPDN TAHUN 2023

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelamar mendaftar secara <i>online</i> /daring	3 - 30 April 2023	laman https://dikdin.bkn.go.id/
2.	Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan Tahun 2023		
3.	Pelamar <i>log in</i> dengan menggunakan NIK dan <i>Password</i> yang telah didaftarkan.		
4.	Pelamar memilih Sekolah Kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN.		
5.	Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek <i>resume</i> dan mencetak bukti pendaftaran.		
6.	Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah.	4 April - 2 Mei 2023	laman https://dikdin.bkn.go.id/
7.	Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi	4 Mei 2023	laman https://dikdin.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
8.	Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai kode <i>billing</i> .	Mei 2023	Bank yang ditunjuk oleh BKN
9.	Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing.	Mei 2023	laman https://dikdin.bkn.go.id/
10.	Pengumuman daftar nama peserta SKD	Mei 2023	laman https://dikdin.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id
11.	Pelaksanaan SKD	Mei - Juni 2023	Lokasi yang ditunjuk Panitia SPCP IPDN
12.	Pengumuman Hasil SKD	Juni - Juli 2023	laman https://dikdin.bkn.go.id/ dan laman https://spcp.ipdn.ac.id
13.	Pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I	Juli 2023	Rumah Sakit Bhayangkara/ Biddokkes POLDA
14.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Tahap I	Juli 2023	laman https://spcp.ipdn.ac.id
15.	Pelaksanaan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran	Juli 2023	Psikologi POLDA
16.	Pengumuman Hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran	Juli - Agustus 2023	laman https://spcp.ipdn.ac.id
17.	Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran	Agustus 2023	Rumah Sakit Bhayangkara/ Biddokkes/ POLDA
18.	Tes Kesehatan Tahap II		
19.	Tes Kesamaptan dan Pemeriksaan Penampilan		

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
20.	Pengumuman Hasil Kelulusan Akhir SPCP IPDN Tahun 2023	Agustus 2023	laman_ https://spcp.ipdn.ac.id
21.	Registrasi Calon Praja bertempat di IPDN Kampus Jatinangor	Agustus 2023	Kampus IPDN Jatinangor

Catatan:

Diharapkan peserta selalu *update* informasi pelaksanaan SPCP (antara lain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan tes dan informasi lainnya) pada laman <https://spcp.ipdn.ac.id>.

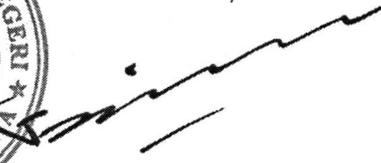
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1001

